

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								10,510,143,329	
2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								348,413,449	
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 persen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	138,381,750	
2	08	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	0 Dokumen 4 Dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 persen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,194,100	
2	08	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen 0 Laporan	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 persen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,529,720	
2	08	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen 0 Laporan	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 persen	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	52,307,879	
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7,073,665,903	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang 0 Orang/ Bulan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 persen	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	6,715,926,503	
2	08	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah ASN yang mendapatkan honor Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19 Orang 0 Dokumen	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 persen	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	319,984,000	
2	08	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disiapkan	0 Laporan 14 Dokumen	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 persen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,755,400	
2	08	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								73,388,000	
2	08	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	100 persen	Jumlah BMD yang diasuransikan Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 Unit 0 Dokumen	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 persen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,800,000	
2	08	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honor	0 Laporan 6 Orang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 persen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,588,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	100 persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	0 Laporan 3 Dokumen	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 persen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								83,098,450	
2	08	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	JUmlah ASN dan Non ASN yang mengikuti kegiatan capacity building Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang 0 Orang	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,422,450	
2	08	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Kali 0 Orang	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,676,000	
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,007,457,134	
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Jenis 0 Paket	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	
2	08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket 15 Jenis	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	84,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket 2 Jenis	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	107,437,000	
2	08	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Jenis 0 Paket	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89,138,200	
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Jenis 0 Paket	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	31,836,750	
2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis 0 Dokumen	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen 0 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	605,047,934	
2	08	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Arsip Dinamis Perangkat Daerah yang dikelola Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Arsip 0 Dokumen	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,997,250	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								214,241,800	
2	08	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket 0 Paket	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,241,800	
2	08	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit 0 Unit	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,241,908,593	
2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	0 Laporan 1500 surat	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,165,000	
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Tagihan Air, Listrik, Telepon dan Internet yang dibayarkan	0 Laporan 12 Bulan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	363,800,000	
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	0 Laporan 20 Orang	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	874,943,593	
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								467,970,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit 0 Unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,190,000	
2	08	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit 0 Unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122,100,000	
2	08	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Jenis 0 Unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,680,000	
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/rehab	0 Unit 2 Unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	225,000,000	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								5,367,655,175	
2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi								91,976,800	
2	08	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	11,54 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Gender	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,801,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	11,54 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Gender	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	11,54 persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	51 Orang	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Gender	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,960,600	
2	08	02	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	11,54 persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	51 Orang	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Gender	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,214,800	
2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi								4,328,417,150	
2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	11,54 persen	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	Persentase perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi yang diberdayakan	10.77 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,504,450	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	11,54 persen	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota	3 Organisasi	Persentase perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi yang diberdayakan	10.77 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,278,912,700	
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi								947,261,225	
2	08	02	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	11,54 persen	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang di tingkatkan kapasitas kelembagaannya	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	947,261,225	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								1,034,244,500	
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								137,084,100	
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	84 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi kebijakan, program dan kegiatan yang diselaraskan dengan stakeholders terkait pada Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Pergub	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,940,100	
2	08	03	1.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	84 persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	30 Perangkat Daerah	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89,144,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi								897,160,400	
2	08	03	1.03	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	84 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga Penyedia Layanan yang terhubung dalam jejaring kesetaraan gender dan anak	0 Dokumen 28 Lembaga	Persentase penguatan kelembagaan layanan perlindungan perempuan	85 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	897,160,400	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								1,183,404,850	
2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi								1,183,404,850	
2	08	04	1.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Indeks Kualitas Keluarga	70 indeks	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan pada Keluarga	37.5 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,134,471,850	
2	08	04	1.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Indeks Kualitas Keluarga	70 indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah laporan hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	0 Dokumen 2 Laporan	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan pada Keluarga	37.5 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,933,000	
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								154,400,000	
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi								154,400,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Persentase ketersediaan data terpilah dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan) Persentase ketersediaan data terpilah dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan)	85 persen 90 persen	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia Jumlah jenis/elemen data gender dan anak yang terkumpul	0 Dokumen 32 Elemen Data	Persentase data gender dan anak dalam kelembagaan data yang dikumpulkan, diolah analisis dan disajikan	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,524,600	
2	08	05	1.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Persentase ketersediaan data terpilah dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan) Persentase ketersediaan data terpilah dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan)	85 persen 90 persen	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Jumlah elemen data gender dan anak yang terintegrasi dengan portal satu data Indonesia	0 Dokumen 32 Elemen Data	Persentase data gender dan anak dalam kelembagaan data yang dikumpulkan, diolah analisis dan disajikan	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89,875,400	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								1,749,031,030	
2	08	06	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi								1,492,328,700	
2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	2 Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	15 Lembaga 0 Organisasi	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan pelembagaanya	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,386,660,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	06	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	2 Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	0 Dokumen 19 Kali	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan pelebagaanya	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,667,900	
2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi							256,702,330		
2	08	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	2 Kabupaten/Kota	Jenis layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilaksanakan Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	10 jenis 0 Orang	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan Kapasitasnya	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,167,450	
2	08	06	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	2 Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	0 Dokumen 19 Kali	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan Kapasitasnya	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,488,905	
2	08	06	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	2 Kabupaten/Kota	Jumlah KIE yang dilaksanakan	4 Kali	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan Kapasitasnya	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,573,300	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	06	1.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	2 Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga Penyedia Layanan yang terhubung dalam Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen 8 Lembaga	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan Kapasitasnya	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,472,675	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								1,245,184,800	
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								114,260,600	
2	08	07	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	84 persen	Jumlah Lembaga Layanan dan atau Organisasi Pemerhati/Peduli Anak yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	10 Lembaga 32 Organisasi (embaga dan Ormas)	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap Anak	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,193,300	
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	84 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	1 Dokumen 4 Kali	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap Anak	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,067,300	
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi								1,017,339,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	07	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	84 persen	Jumlah DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah KIE yang dilaksanakan	10 Dokumen 4 Kali	Persentase meningkatnya Perlindungan khusus anak	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,017,339,400	
2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							113,584,800		
2	08	07	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	84 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	0 Dokumen 1 Kali	Persentase meningkatnya kapasitas lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,283,000	
2	08	07	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	84 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	1 Dokumen 32 Lembaga 1 kali	Persentase meningkatnya kapasitas lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,301,800	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							121,787,000		
2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							121,787,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	02	1.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya	80 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah kebijakan pemerintah daerah yang diserasikan	0 Dokumen 1 Dokumen	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100 persen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	14	02	1.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya	80 persen	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan GDPK	0 Dokumen 80 Persen	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100 persen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,787,000	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								189,259,000	
2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal								189,259,000	
2	14	03	1.01	02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Prevalensi KB	55,12 persen	Jenis materi KIE yang disusun Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Jenis 0 Dokumen	Persentase peningkatan pelaksanaan advokasi dan KIE program KKBPK	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,265,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	03	1.01	04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Prevalensi KB	55,12 persen	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja Jumlah mitra kerja yang terlibat dalam advokasi dan KIE program KKBPK	0 Dokumen 4 Mitra Kerja	Persentase peningkatan pelaksanaan advokasi dan KIE program KKBPK	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135,994,000	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								946,114,000	
2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								782,814,000	
2	14	04	1.01	03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks pembangunan keluarga	59,30 indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah pembinaan yang dilakukan	0 Dokumen 2 Kali	Persentase Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	445,749,000	
2	14	04	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Indeks pembangunan keluarga	59,30 indeks	Jumlah pengelola dan pelaksana PIK-R yang mendapatkan peningkatan kapasitas Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	19 PIK-R 0 Organisasi	Persentase Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,879,000	
2	14	04	1.01	14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Indeks pembangunan keluarga	59,30 indeks	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK jumlah fasilitasi Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK yang dilakukan	0 Dokumen 7 Kali	Persentase Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	258,186,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	04	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								163,300,000	
2	14	04	1.02	04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Indeks pembangunan keluarga	59,30 indeks	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Jumlah mitra dan organisasi masyarakat yang mendapatkan penguatan kapasitas	0 Dokumen 2 Kel BKB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,500,000	
2	14	04	1.02	05	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Indeks pembangunan keluarga	59,30 indeks	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB Jumlah Pokja Kampung KB yang mendapatkan fasilitasi pengembangan program ketahanan keluarga	0 Dokumen 3 Kampung KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,800,000	
TOTAL													22,501,223,684	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0001 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								20,000,000	
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								20,000,000	
2	08	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Jenis 0 Paket	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 persen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	16,340,000	
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Dokumen	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 persen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,660,000	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								326,775,500	
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								260,290,500	
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	84 persen	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan	0 Orang 40 Orang	Persentase Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	147,358,500	
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	84 persen	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Koprban Kekerasan Kewenangan Provinsi Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	40 Kali 0 Layanan	Persentase Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112,932,000	
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi								66,485,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0001 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	84 persen	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Jumlah Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang 55 Orang	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	100 persen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,485,000	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								449,989,467	
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi								327,198,967	
2	08	07	1.02	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	84 persen	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang 0 Orang	Persentase penyelesaian kasus kekerasan pada anak	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,086,967	
2	08	07	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	84 persen	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	50 Kali 0 Layanan	Persentase penyelesaian kasus kekerasan pada anak	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	202,112,000	
2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								122,790,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0001 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	07	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	84 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi Jumlah Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Dokumen 80 Orang	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	100 persen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122,790,500	
TOTAL													796,764,967	